BADAN USAHA MILIK DESA DAN PEMBANGUNAN SOSIAL DI KABUPATEN BOJONEGORO

VILLAGE OWNED ENTERPRISES AND SOCIAL DEVELOPMENT IN BOJONEGORO REGION

Versanudin Hekmatyar dan Fentiny Nugroho

Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial, FISIP UI
Gedung Nusantara 2 lantai 2 R.C.L Rudolf, Kampus FISIP UI Depok, Depok, 16424
E-mail: versahekatyar@gmail.com

Diterima: 10 April 2018; Direvisi: 11 Juli 2018; Disetujui: 8 Agustus 2018

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran Badan Usaha Milik (BUM) Desa sebagai instrumen pembangunan sosial dengan mengambil studi kasus di Desa Kedungprimpen. Data dikumpulkan dengan pendekatan kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan. Pertama, BUMDesa sebagai unit usaha ekonomi desa bersifat kolektif antara pemerintah desa dan masyarakat desa, dimana usaha ekonomi yang dilakukan mengandung unsur bisnis ekonomi dan bisnis sosial. Kedua, BUMDes memiliki peran penting didalam pengelolaan irigasi, dan bertanggungjawab penuh untuk melakukan pendistribusian air kesetiap lahan pertanian penduduk Desa Kedungprimpen didalam proses produksi pertanian. Ketiga, BUMDesa memiliki tanggungjawab didalam pembagian hasil usaha pengelolaan irigasi kepada lapisan terbawah di Desa Kedungprimpen. Terakhir, BUMDesa di Desa Kedungprimpen memiliki potensi yang dapat dikelola berupa tanah kas desa. Pengelolaan tanah kas desa oleh BUMDesa dapat digunakan sebagai strategi peningkatan kualitas ekonomi dan mengurangi adanya ketimpangan penduduk Desa Kedungprimpen. Hal ini dapat dilakukan dengan adanya komitmen kuat antara seluruh stakeholder untuk mendistribusikan tanah kas desa kepada golongan lapisan terbawah penduduk di Desa Kedungprimpen dengan biaya sewa terjangkau. Sebagai rekomendasi, upaya tersebut perlu dikembangkan dengan meningkatkan status kelembagaan, sumberdaya manusia, sarana prasarana, dan otoritas dari BUMDesa.

Kata Kunci: BUMDesa, Peran BUMDesa, Pembangunan Sosial.

Abstract

The objective of this study is describing the role of BUMDesa as a social development instrument with a case study in Kedungprimpen Village. Qualitative approach was used to collect the data and descriptively presented. The results are as follows. First, BUMDesa as a village economic business unit use collective method between village government and village community, the economic effort that has been done itself contains economic and social business element. Second, BUMDesa has important role in managing the irrigation, and has fully responsible for distributing water to every farmland of Kedungprimpen villagers in the agricultural production process. Third, BUMDesa has responsibility to distribute the business result of irrigation management to the lowest layer in Kedungprimpen Village. Finally, BUMDesa in Kedungprimpen Village has potential that can be managed, which is the form of village treasury lands. Village cash management by BUMDesa can be used as a strategy to improve quality of the economy and reducing the disparity of the people of Kedungprimpen Village. This can be done with a strong commitment among all stakeholders to distribute the village treasury lands to the lowest layer of people in Kedungprimpen Village with low rents. As a recommendation, these efforts need to be developed, by improving the status of institutional, human resources, infrastructure, and the authority of BUMDesa.

Keywords: BUMDesa, Role of BUMDesa, Social Development.

PENDAHULUAN

Pembangunan di pedesaan telah lama mendapatkan perhatian pemerintah. Setidaknya pembangunan pedesaan sudah dimulai sejak masa orde baru dengan program revolusi hijau pada tahun 1980an yang bertujuan meningkatkan hasil produksi pertanian. Program revolusi hijau ditandai dengan memodernisasi sistem pertanian, diantaranya adalah perbaikan sistem irigasi, pemakaian bibit unggul, pupuk dan pestisida.

Revolusi hijau terbukti ampuh untuk menaikkan produktivitas pertanian, selama Pelita I dicapai kenaikan produksi padi sebesar 6 persen per tahun, dimana kenaikan tersebut terutama adalah berkat usaha-usaha dibidang intensifikasi produksi padi yang pelaksanaannya dititikberatkan di Pulau Jawa. Disisi lain, revolusi hijau juga menciptakan distorsi pembangunan dengan menciptakan kesenjangan ekonomi dan sosial dipedesaan karena kenyataannya revolusi hijau hanya menguntungkan petani yang memiliki lahan pertanian luas dan akses terhadap permodalan.

Hampir tiga *decade* sejak pertama kali program revolusi hijau dilaksanakan, program-program pembangunan di pedesaan belum membuahkan hasil yang memuaskan sebagaimana diinginkan bersama. Kondisi ini dapat dilihat dari data BPS bulan maret 2017 yang menunjukkan total jumlah penduduk miskin Indonesia 27,77 juta jiwa (10,64%), dimana 17.1 juta jiwa (61,5%) penduduk miskin tinggal di pedesaan dan 10,67 juta jiwa (38,4%) berada perkotaan. Adapun garis kemiskinan Indonesia per Maret 2017 adalah 361.496/kapita/bulan untuk pedesaan dan 385.621/kapita/bulan untuk perkotaan. Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa distribusi kemiskinan tidak merata dan lebih terkonsentrasi dipedesaan.

Kemiskinan merupakan permasalahan mendasar bagi Negara Indonesia yang bersifat multidimensional sekaligus politis tergantung bagaimana kepentingan dan cara melihatnya. Sumarti, (2007) menjelaskan bahwa kemiskinan adalah kondisi yang bersifat multidimensional, tidak hanya mencakup tingkat pendapatan yang rendah, tetapi juga (a) Kurangnya kesempatan/akses. Pendapatan yang rendah terkait erat dengan distribusi asset fisik (lahan), sumberdaya manusia, dan asset sosial, serta kesempatan usaha/kerja; (b) Rendahnya kemampuan (pendidikan dan kesehatan); (c) Rendahnya tingkat keamanan (jaminan terhadap resiko dan tekanan ekonomi) baik di tingkat nasional, lokal maupun rumahtangga (individu); (d) Pemberdayaan (kapasitas golongan miskin untuk mengakses dan mempengaruhi kelembagaan dan proses sosial yang membentuk alokasi sumberdaya). Dengan kondisi seperti ini, seseorang akan terjebak di dalam Perangkap kemiskinan (*poverty trap*).

Perangkap kemiskinan (*poverty trap*) merupakan inti dari masalah kemiskinan yang menurut Chamber (1988) terdiri dari lima unsur yaitu: (a) Kemiskinan itu sendiri; (b) kelemahan fisik; (c) keterasingan/kadar isolasi; (d). Kerentanan/kerawanan; (e) ketidakberdayaan. Kelima unsur ini berkaitan antara satu dengan yang lain dalam satu jaringan interaksi timbal balik sehingga perangkap kemiskinan benar-benar mematikan peluang hidup masyarakat dan keluarga miskin.

Pemahaman tentang pengertian kemiskinan dilakukan dengan menggunakan ukuran-ukuran yang disepakati untuk menggolongkan seseorang kedalam taraf hidup tertentu, miskin atau tidak miskin. Sebagaimana BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*) untuk mengukur kemiskinan. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang

sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan. Jadi Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Besarnya angka kemiskinan masih menjadi masalah utama yang dihadapi dalam menentukan kebijakan dan perencanaan pembangunan.

Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi kekurangan program-program pembangunan yang telah dilakukan pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan di pedesaan. Salah satunya adalah terlalu besarnya intervensi pemerintah (*top down*) dalam setiap program pembangunan, sehingga mengesampingkan inisiatif dari masyarakat (*bottom up*). Kemudian juga kegagalan pemerintah dalam memastikan bahwa keuntungan dari program pembangunan dapat menyentuh masyarakat secara keseluruhan. Lebih lanjut, program pembangunan memiliki kecenderungan lebih berfokus pada pembangunan ekonomi dan tidak sejalan dengan pembangunan pada aspek sosial. Sehingga, dalam menentukan arah pembangunan penting untuk mengharmonisasikan tujuan-tujuan dari pembangunan ekonomi dan pembangunan sosial.

Midgley (2005) mendefinisikan pembangunan sosial sebagai sebuah proses perubahan sosial yang terencana yang didesain untuk mengangkat kesejahteraan penduduk menyeluruh dengan menggabungkannya dengan proses pembangunan ekonomi yang dinamis.

Masyarakat adalah pelaku utama pembangunan dan pemerintah berkewajiban mengarahkan, membimbing, melindungi serta menumbuhkan suasana yang menunjang. Kegiatan masyarakat dan kegiatan Pemerintah harus berjalan secara harmonis, saling menunjang, saling mengisi, dan saling

melengkapi dalam satu kesatuan langkah menuju tercapainya tujuan pembangunan nasional. Hal ini harus dilakukan sampai pada unit terkecil dalam dalam pemerintahan, yakni pada unit desa.

Desain pembangunan dilaksanakan salah satunya melalui pendirian kelembagaan ekonomi desa yang dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa. Lembaga ekonomi ini tidak lagi didirikan atas dasar instruksi pemerintah, tetapi didasarkan pada keinginan masyarakat desa yang berangkat dari potensi lokal yang jika dikelola dengan baik akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Usaha dalam peningkatan kesejahteraan dilakukan dengan mengupayakan terbangunnya sumber-sumber penghasilan asli desa (PADes). Sumber penghasilan desa tersebut diantaranya berbentuk badan usaha, atau badan usaha milik desa (BUMDesa).

Secara historis, landasan hukum tentang BUMDesa dimulai dengan disahkannya UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 213 ayat (1) "Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa". Rumusan yang sama diatur dalam PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa pada bagian kelima tentang Badan Usaha Milik Desa yang terdiri dari Pasal 78-81 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa. Meskipun landasan hukum telah disahkan, fakta dilapangan menunjukkan bahwa implementasi BUMDesa belum sepenuhnya dilaksanakan oleh seluruh desa yang ada di Indonesia.

Selanjutnya, disahkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa lebih luas untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama, termasuk juga memajukan perekonomian

masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional. Hal ini secara eksplisit termuat pada Bab X yang terdiri dari Pasal 87-90 tentang Badan Usaha Milik Desa. Serta secara khusus diatur didalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran BUM Desa.

Upaya pemerintah dalam mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa lebih luas untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama sekaligus secara tegas membedakan antara Pembangunan Desa dan Pembangunan Perdesaan. Perbedaan ini terkait dari paradigma pembangunan desa yang digunakan yaitu antara pembangunan desa dan pembangunan perdesaan. Pembangunan Desa menggunakan Paradigma “Desa Membangun” berbasis Desa, sedangkan Pembangunan Perdesaan menggunakan Paradigma “Membangun Desa” berbasis Kawasan Perdesaan.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti mencoba untuk berfokus pada peran BUMDesa sebagai instrumen pembangunan sosial dengan menempatkan desa sebagai subjek pembangunan. Hal ini dapat didorong salah satunya dengan memanfaatkan BUMDesa sebagai strategi pembangunan terpadu. Setidaknya untuk mencapai hal tersebut terdapat beberapa prasyarat, yang oleh Putra, (2015) diterjemahkan kedalam “*Tradisi Berdesa*”, yakni:

1. BUMDesa membutuhkan modal sosial (kerja sama, solidaritas, kepercayaan, dan sejenisnya) untuk pengembangan usaha melalui jejaring sosial yang lebih inklusif dan lebih luas.
2. BUMDesa berkembang dalam politik inklusif melalui praksis Musyawarah

Desa sebagai forum tertinggi untuk pengembangan usaha ekonomi Desa yang digerakkan oleh BUM Desa.

3. BUMDesa merupakan salah satu bentuk usaha ekonomi Desa yang bersifat kolektif antara pemerintah Desa dan masyarakat Desa. Usaha ekonomi Desa kolektif yang dilakukan oleh BUM Desa mengandung unsur bisnis sosial dan bisnis ekonomi.

Atas dasar informasi tersebut pada penelitian ini, peran BUMDesa sebagai instrumen pembangunan sosial mencoba untuk diidentifikasi lebih lanjut dengan menggunakan paradigma “Desa Membangun” di Desa Kedungprimpen, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Creswell (2016) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang- dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema yang khusus ke tema-tema umum, dan menafsirkan makna data. Pada penelitian ini kompleksitas persoalan yang mencoba untuk diterjemahkan adalah tentang peran BUMDesa sebagai instrumen pembangunan sosial dipedesaan.

Selanjutnya, strategi yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Menurut Creswell, (2014) penelitian studi kasus adalah strategi kualitatif di mana peneliti mengkaji sebuah program, kejadian, aktivitas, proses atau satu atau lebih individu dengan lebih mendalam. Kasus-kasus tersebut dibatasi oleh

waktu dan aktivitas, sehingga peneliti harus mengumpulkan informasi yang detail dengan menggunakan beragam prosedur pengumpulan data selama periode waktu tertentu. Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskripsi dengan mencoba menggambarkan peran BUMDesa sebagai instrumen pembangunan sosial dipedesaan.

Pembahasan mengenai para partisipan dan lokasi penelitian dapat mencakup empat aspek yang dinyatakan oleh Miles dan Huberman (1994 dalam Creswell, 2016), yaitu: *setting* (lokasi penelitian), aktor (siapa yang akan diobservasi atau diwawancarai), peristiwa (kejadian apa saja yang dirasakan oleh aktor yang akan dijadikan topik wawancara dan observasi), dan proses (sifat peristiwa yang dirasakan oleh aktor dalam lokasi penelitian). Sehingga dalam penelitian ini, teknik pemilihan informan yang digunakan adalah *nonprobability sampling* dengan *purposive sampling* dimana informan yang dipilih disesuaikan dengan kebutuhan data penelitian. Data pada penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

Data primer diperoleh dari informan melalui pengamatan, observasi dan wawancara mendalam. Selanjutnya hasil dari pengamatan observasi, dan wawancara mendalam dituangkan dalam bentuk uraian rinci dan kutipan langsung. Data sekunder diperoleh dari informasi tertulis, data-data dan literatur-literatur yang mendukung kebutuhan data. Data dan informasi pada penelitian ini diperoleh dari pemerintahan desa, pengurus BUMDesa, dan penelusuran informasi melalui pustaka. Data primer dan data skunder sifatnya saling melengkapi sehingga hasil penelitian lebih akurat. Berikut adalah tabel mengenai jenis dan sumber data dalam peneltian ini.

Selanjutnya, penelitian ini mengambil lokasi penelitian di Desa Kedungprimpen,

Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro, dengan fokus kajian pada BUMDesa sebagai instrumen pembangunan sosial dipedesaan. Pertimbangan pemilihan lokasi ini karena Bojonegoro mewakili salah satu daerah yang memiliki karakteristik secara sejarah sebagai daerah miskin, dan memiliki kerentanan terhadap bencana alam karena berbatasan langsung dengan sungai bengawan solo. Kelemahan dan kerentanan tersebut juga sekaligus menjadi peluang pada pengembangan BUMDesa sebagai instrumen pembangunan sosial. Secara khusus dengan memanfaatkan aliran sungai bengawan solo untuk irigasi lahan pertanian yang dikelola sebagai unit usaha dari BUMDesa.

Analisa hasil penelitian dilakukan dengan mengorganisasikan data, mereduksi data, dan menyajikan data dalam bentuk bagan, tabel, atau pembahasan secara deskriptif. Creswell, (2014) menjelaskan bahwa analisis data dalam penelitian kualitatif dimulai dengan menyiapkan dan menorganisasikan data (yaitu data teks seperti transkrip, atau data gambar seperti foto) untuk analisis, kemudian mereduksi data menjadi tema melalui proses dan peringkasan kode, dan terakhir menyajikan data dalam bentuk bagan, tabel, atau pembahasan.

HASIL PENELITIAN

Gambaran Umum Lokasi

Secara administratif, Desa Kedungprimpen terletak di Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, dengan posisi geografis antara 07,074890° LS dan 112,07254° BT. Jarak antara Desa Kedungprimpen dengan pusat kecamatan, yaitu adalah 9 Km, dapat ditempuh selama 20 menit dengan kendaraan yang paling banyak dipakai adalah motor. Sedangkan jarak dengan pusat kabupaten adalah 26 Km dengan waktu tempuh sekitar 60 menit dengan menggunakan kendaraan bermotor.

Desa Kedungprimpen berada pada dataran rendah 15 mdpl (*lowland*), dengan curah hujan 121,43 mm dan suhu harian berkisar 22°C sampai dengan 29 °C. Berada pada bagian utara dari Kabupaten Bojonegoro, berbatasan langsung dengan Kabupaten Tuban dan berada pada aliran sungai Bengawan Solo yang merentang di tengah Pulau Jawa, mulai dari Wonogiri, Jawa Tengah sampai Gresik, Jawa Timur.

Desa Kedungprimpen terbagi kedalam tiga dusun, 5 Rukun Warga (RW), dan 22 Rukun Tetangga (RT). Ketiga dusun tersebut ialah Dusun Peni, Kedung dan Blimbing. Luas wilayah Desa Kedungprimpen adalah 376 Ha terdiri dari 303,67 Ha sawah, 4,89 Ha tanah tegal/ladang, 44,40 Ha permukiman dan 20,98 Ha tanah pekarangan. Sistem pengairan sawah adalah irigasi teknis yang cukup baik, dan semua sawah yang ada di Desa Kedungprimpen dapat ditanami padi dua kali atau lebih dalam setahun. Akan tetapi pada musim penghujan karena sering terjadi banjir, sawah umumnya diberakan setelah musim tanam (MT) II.

Jumlah penduduk Desa Kedungprimpen pada tahun 2016 mencapai 2999 jiwa terdiri atas, 1420 jiwa penduduk laki-laki (L) dan 1579 jiwa penduduk perempuan (P) dan terhimpun dalam 882 KK dengan kepadatan penduduk 798 jiwa/Km². Penduduk Desa Kedungprimpen ditinjau dari struktur umur menunjukkan sebaran yang merata disetiap kategorinya, dengan rasio jenis kelamin 90 laki-laki per 100 perempuan.

Mata Pencaharian Penduduk

Berdasarkan potensi sumberdaya manusia tersebut, susunan penduduk menurut jenis mata pencahariannya adalah diantara penduduk usia produktif yang berjumlah 2257 jiwa (75%), 1674 jiwa (74%) bekerja dibidang pertanian, 408 jiwa (18%) tidak/belum bekerja, dan sisanya bekerja dibidang jasa, serta diantaranya

ada yang menjadi pegawai negeri ataupun pensiunan pegawai negeri.

Menurut data statistik tersebut 1674 jiwa (74%) yang bekerja dibidang pertanian digolongkan lagi kedalam dua golongan, yang terdiri dari 1073 jiwa (48%) sebagai petani dan 601 jiwa (27%) sebagai buruh tani. Dari angka penggolongan ini dapat dilihat pola penguasaan tanah yang terjadi di Desa Kedungprimpen. Namun, harus diperhatikan bahwa angka-angka statistik ini tidak memberikan keterangan tentang pekerjaan sampingan. Kenyataannya jenis mata pencaharian dan jumlah penduduk yang ikut terlibat didalam kegiatan mata pencaharian tidak hanya sebesar angka statistik yang tersedia di desa. Misalnya PNS yang juga ikut melakukan aktivitas nafkah sebagai petani, atau pada kategori petani yang juga ikut serta kedalam aktivitas sebagai buruh tani.

Sebagaimana ciri masyarakat agraris sebagian umum, dimana masyarakatnya menggantungkan hidup pada sektor pertanian dengan ketergantungan yang tinggi pada lahan pertanian.

“disini itu semua petani, meskipun punya pekerjaan lainnya, jadi petani tetap yang nomor satu. Tani itu membuat hati damai, meskipun apa-apa mahal kalau punya beras sendiri kan sudah bisa makan” (LJN, Perangkat Desa, 30 November 2017).

Pertanian merupakan sumber nafkah terpenting di Desa Kedungprimpen. Secara umum tanah berdasarkan pemilikan dan penguasaan di Desa Kedungprimpen dikategorikan kedalam dua kategori, tanah yang dimiliki desa dan tanah yang dimiliki penduduk. Tanah yang dikuasai desa berdasarkan fungsinya ada tiga jenis, sebagaimana yang disampaikan oleh informan yakni,

“untuk fasilitas umum, bengkok sebagai

gaji perangkat desa, dan sisanya dilelang untuk keperluan kas desa” (SH, Perangkat Desa, 30 November 2017)

Peruntukan pertama adalah tanah yang digunakan sebagai fasilitas umum, seperti untuk bangunan pemerintahan, bangunan sekolah, masjid, puskesmas, pasar desa, pemakaman dan lapangan.

“fasilitas umum termasuk sekolah, masjid, balai desa, puskesmas, pemakaman, dan juga lapangan. Awalnya ada yang sebagian tanah itu punya warga, lalu ditukar dengan tanah bengkok desa. Seperti lapangan, desa butuh lapangan yang dekat dengan jalan tapi punyanya sawah, akhirnya kita berunding dengan beberapa warga yang punya tanah sesuai dengan kebutuhan desa, lalu menawarkan untuk ditukar sawahnya. Alhamdulillah ada yang mau” (SH, Perangkat Desa, 30 November 2017)

Peruntukan kedua adalah tanah kas desa sebagai tanah bengkok yang diberikan kepada aparat desa untuk dikelola selama menjabat sebagai pengganti dari gaji. Luas keseluruhan lahan bengkok di Desa Kedungprimpen adalah sekitar 22,54 Ha. Terakhir adalah tanah kas desa yang berfungsi untuk menambah pemasukan desa. Tanah kas desa pada kategori ini biasa dilelang setiap tahun untuk mendapatkan uang tunai.

“tanah kas desa yang dilelang, ada sekitar 16 Ha. Kesemuanya adalah sawah, setahun bisa panen dua kali, dan lelangan biasa dilakukan setelah musim tanam kedua, kira-kira bulan februari. Kita tentukan harga dasarnya, dan harga akhir adalah berdasarkan penawaran tertinggi, dengan sistem lelangan tertutup” (SH, Perangkat Desa, 30 November 2017).

Luas pasti tanah kas desa yang dilelang berdasarkan penelusuran dokumen adalah

seluas 16,635 Ha. Sistem lelang tertutup, yakni dilakukan dengan cara, peserta mengisi formulir harga penawaran yang telah disediakan oleh panitia. Selisih harga lelang yang disepakai adalah Rp. 10.000. Sistem ini dipilih untuk mencegah adanya perang harga yang tidak sehat diantara warga desa.

“tahun 2017, jumlah tanah yang dilelang ada 49 persil dengan luas dan lokasi berbeda yang menentukan harga. Total hasil lelang yang didapat adalah Rp. 500.540.000” (SH, Perangkat Desa, 30 November 2017).

Sementara tanah yang dimiliki penduduk Desa Kedungprimpen secara total adalah 240,13 Ha. Berdasarkan buku pajak bumi dan bangunan terdapat 882 rumah tangga pemilik tanah di Desa Kedungprimpen. Tanah-tanah yang dimiliki penduduk sebagian besar diperoleh melalui mekanisme warisan, dan sebagian kecil lain melalui pembelian. Selebihnya, tanah-tanah pertanian yang ada di Desa Kedungprimpen ada juga yang dimiliki oleh orang luar Desa Kedungprimpen.

“rata-rata kepemilikan sawah penduduk disini dibawah 0,5 Ha, hanya sedikit yang punya sawah sampai diatas 1 Ha” (LJN, Perangkat Desa, 30 November 2017).

Rata-rata luas pemilikan di Desa Kedungprimpen, secara resmi berdasarkan data pajak bumi dan bangunan adalah 0,27 Ha, namun kenyataannya menunjukkan bahwa tanah-tanah pertanian di Desa Kedungprimpen tidak terbagi secara merata. Proporsi pemilikan tanah paling besar adalah kurang dari 0,1 Ha sebanyak 291 rumah tangga atau 32,99% dari keseluruhan rumah tangga di Desa Kedungprimpen. Artinya rumah tangga yang demikian adalah rumah tangga yang hanya memiliki sebidang kecil tanah tempat rumah mereka berdiri, dan tidak memiliki tanah pertanian. Fakta ini menunjukkan bahwa di Desa Kedungprimpen

terjadi ketimpangan distribusi pemilikan lahan sebagai aspek paling penting dalam sumber nafkah penduduk Desa Kedungprimpen.

Kelembagaan BUMDesa

Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDesa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Pendirian BUMDesa disepakati melalui musyawarah desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa, serta dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. Hasil usaha BUMDesa dimanfaatkan untuk pengembangan usaha dan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Budiono, (2015) menyebutkan bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Kedungprimpen berdiri sejak tahun 2006, BUMDes ini merupakan lanjutan dari Usaha Desa yang telah ada sejak tahun 1994 yang sebelumnya bernama Usaha Desa.

“BUMDes disini sebenarnya sudah lama, sejak tahun 90an, sejak areal (irigasi) dikelola oleh desa sudah menjadi bagian dari usaha desa. Namun, baru pada tahun-tahun belakangan ini BUMDes lebih banyak mendapatkan perhatian dari pemerintah” (SPI, Direktur BUMDesa, 02 Desember 2017).

Pada Desa Kedungprimpen, BUMDesa memiliki unit usaha berupa pengelolaan irigasi dengan nama Pompanisasi Srisedani yang dikelola secara terpisah dari APBDesa.

“kalau unit usahanya, BUMDes baru memiliki usaha pada bidang pompanisasi yang dikelola oleh pengurus areal (irigasi), dan bertanggungjawab pada direksi BUMDes, dan Kepala Desa. Kedapan kita ingin untuk melakukan irigasi pada desa-desa tetangga, dan menambah unit usaha, mungkin pada pengelolaan tanah lelangan, atau pasar desa” (SPI, Direktur BUMDesa, 02 Desember 2017).

Pompanisasi Srisedani memiliki tujuan untuk mengelola irigasi dengan wilayah kerjanya adalah lahan pertanian Desa Kedungprimpen. Secara struktur pengurus Pompanisasi Srisedani terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, koordinator lapang dan koordinator logistik yang dipilih/diangkat/ dan diberhentikan oleh direksi (Direktur BUMDesa) atas persetujuan komisaris (kepala desa) dengan masa jabatan selama tiga tahun.

Pengurus pompanisasi Srisedani bertugas untuk memberikan pertanggungjawaban administrasi keuangan, bidang lapangan dan logistik kepada direksi. Pengurus pompanisasi Srisedani dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh pekerja lapang yang membantu melaksanakan dan mengatur pembagian air pada wilayah kerja, operator bertugas untuk mengoperasikan pompa induk, dan servis yang bertugas untuk merawat keseluruhan pompa/mesin asset dari Pompanisasi Srisedani. Keseluruhan total jumlah pekerja lapang, operator, dan servis adalah 22 orang.

“Untuk pekerjaan tersebut, Pompanisasi Srisedani mendapatkan sepetujuh bagian dari total panen di Desa Kedungprimpen pada setiap musim tanam. Dari hasil ini, kemudian dikurangi biaya produksi, lalu dikeluarkan zakat 2.5%, dan baru dibagi sesuai dengan AD/ART. Tahun 2017, hasil areal (irigasi), Alhamdulillah sekitar 1,3 M” (SPI, Direktur BUMDesa, 02 Desember 2017).

Berdasarkan hasil usaha tersebut, setelah dikurangi dengan modal usaha yang dikeluarkan selama satu musim. Adapun hasil usaha dari Pompanisasi Srisedani tersebut pada MT1 tahun 2017 setelah dikurangi modal usaha adalah sebesar Rp. 1.128.200.000. Kemudian dari hasil tersebut dialokasikan 2,5% untuk zakat yang disalurkan pada fakir miskin dan anak yatim, sebesar Rp. 28.205.000. Selanjutnya hasil usaha dibagi sesuai dengan AD/ART BUMDesa, sebagai berikut.

Tabel 1. Pembagian hasil usaha Pompanisasi Srisedani

No	Alokasi	Persentase	Jumlah
1	Komisaris I	3,00%	Rp32.999.850
2	Komisaris II	1,50%	Rp16.499.925
3	Direksi	4,00%	Rp43.999.800
4	Pengurus Unit	10,00%	Rp109.999.500
5	Pekerja Lapangan	24,00%	Rp263.998.800
6	Pendidikan	5,00%	Rp54.999.750
7	Kesejahteraan Desa	12,00%	Rp131.999.400
No	Alokasi	Persentase	Jumlah
8	Pembangunan Desa	20,00%	Rp219.999.000
9	Cadangan Modal	11,00%	Rp120.999.450
10	Sarana Pompanisasi	3,50%	Rp38.499.825
11	Lain-lain	6,00%	Rp65.999.700
Jumlah		100,00%	Rp1.099.995.000

Sumber: diolah dari AD/ART BUMDesa dan hasil wawancara

Berdasarkan pada pembagian hasil usaha Pompanisasi Srisedani diatas, pada kategori pendidikan dikelompokkan lagi kedalam beberapa alokasi pembagian. Pembagian ini didasarkan pada lembaga-lembaga pendidikan yang ada di Desa Kedungprimpen, baik pendidikan formal maupun pendidikan nonformal. Secara lengkap, alokasi pembagian hasil usaha untuk pendidikan disajikan pada tabel 2.

Tabel 2. Pembagian hasil usaha Pompanisasi Srisedani untuk pendidikan

No	Alokasi	Persentase	Jumlah
1	Pos PAUD	0,50%	Rp5.499.975
2	PAUD	0,50%	Rp5.499.975
3	TK/RA	1,00%	Rp10.999.950
4	SD/MI	0,75%	Rp8.249.963
5	SMP/MTs	0,75%	Rp8.249.963
6	Ponpes	0,50%	Rp5.499.975
7	Sarana Pendidikan	1,00%	Rp10.999.950
Jumlah		5,00%	Rp54.999.750

Sumber: diolah dari AD/ART BUMDesa dan hasil wawancara

Sedangkan pada kategori kesejahteraan desa, secara umum alokasi bagi hasil Pompanisasi Srisedani hanya dialokasikan kepada pada aparatur desa, dan belum terdistribusi keseluruh lapisan masyarakat sebagaimana ditunjukkan pada tabel 3 berikut. Hal ini berarti belum ada alokasi yang secara khusus diprioritaskan kepada lapisan terbawah penduduk di Desa Kedungprimpen diluar 2,5% dari zakat yang dikeluarkan.

Tabel 3. Pembagian hasil usaha Pompanisasi Srisedani untuk kesejahteraan desa

No	Alokasi	Persentase	Jumlah
1	Perangkat Desa	1,50%	Rp16.499.925
2	LPMD	0,25%	Rp2.749.988
3	BPD	2,25%	Rp24.749.888
4	RT/RW	2,00%	Rp21.999.900
5	Karang Taruna	1,00%	Rp10.999.950
6	Kader Posyandu	1,00%	Rp10.999.950
7	Muspika	1,00%	Rp10.999.950
8	PKK	1,00%	Rp10.999.950
9	Kelompok Tani	0,75%	Rp8.249.963
10	LINMAS	0,75%	Rp8.249.963
11	Pertanian/Pengairan	0,50%	Rp5.499.975
Jumlah		12,00%	Rp131.999.400

Sumber: diolah dari AD/ART BUMDesa dan hasil wawancara

PEMBAHASAN

BUMDesa: Strategi Pembangunan Terpadu

Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas dengan melihat apa yang akan terjadi pada tahun-tahun mendatang. Penting untuk diperhatikan, pertama tentang transisi demografis, peningkatan proporsi penduduk usia muda memberikan tekanan pada sumber-sumber mata pencaharian penduduk Desa Kedungprimpen yang semakin terbatas, sehingga penting untuk dikelola secara bijak, dan implikasinya pada perumusan kebijakan untuk kesejahteraan sosial penting untuk diperjelas. Pelayanan sumberdaya sosial dan ekonomi harus memberi tempat pada penduduk usia muda, hal ini sudah seharusnya menjadi prioritas dalam menyusun program pembangunan kedepan.

Kedua, tentang ketergantungan penduduk terhadap lahan pertanian yang masih tinggi. Lahan pertanian merupakan salah satu faktor produksi yang penting bagi penduduk di Desa Kedungprimpen sebagaimana modal dan tenaga kerja. Lahan pertanian di Desa Kedungprimpen masih terkait erat dengan sumber nafkah penduduknya. Tingginya tingkat ketergantungan penduduk pada tanah pertanian juga terkait erat dengan pandangan masyarakat setempat yang melatarbelakangi diferensiasi sosial tentang orang kaya, cukup, dan miskin. Perbedaan antara lapisan atas dan bawah semakin nyata dalam hal pemilikan lahan pertanian dan sistem perburuhan yang berlaku.

Atas dasar tersebut, pembangunan desa dapat dirumuskan kembali sebagai upaya yang mencakup penyediaan peluang bagi kaum muda, pria, dan wanita miskin di desa untuk menuntut dan mendapatkan lebih banyak manfaat dari program pembanguan. Hal ini dapat didorong salah satunya dengan memanfaatkan BUMDesa sebagai strategi pembangunan terpadu.

Strategi pembangunan terpadu didalam perencanaan pembangunan membutuhkan penekanan yang sama pada pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan komitmen yang sama antara perencana pembangunan dengan masyarakat sebagai subjek pembangunan. BUMDesa sebagai kelembagaan ekonomi desa yang dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa berdasarkan kebutuhan dan potensi yang tersedia sangat terkait erat dengan realitas masyarakat setempat. Sehingga, dari pada hanya bergantung dan menunggu pada intervensi program-program pembangunan dari pemerintah yang menciptakan lapangan kerja, desain intervensi pada level desa melalui pengembangan BUMDesa untuk meningkatkan kapasitas produktif masyarakat desa lebih mungkin untuk dijalankan.

Strategi ini tidak hanya sejalan dengan realitas sosial lokal yang ada didesa, namun juga sesuai dengan potensi ekonomi yang ada. Dengan demikian, pengembangan BUMDesa untuk meningkatkan kapasitas produktif masyarakat desa telah memenuhi prasyarat, yang oleh Putra, (2015) diterjemahkan kedalam “*Tradisi Berdesa*”, yakni:

1. BUMDesa membutuhkan modal sosial (kerja sama, solidaritas, kepercayaan, dan sejenisnya) untuk pengembangan usaha yang menjangkau jejaring sosial yang lebih inklusif dan lebih luas.
2. BUMDesa berkembang dalam politik inklusif melalui praksis Musyawarah Desa sebagai forum tertinggi untuk pengembangan usaha ekonomi Desa yang digerakkan oleh BUM Desa.
3. BUMDesa merupakan salah satu bentuk usaha ekonomi Desa yang bersifat kolektif antara pemerintah Desa dan masyarakat Desa. Usaha ekonomi Desa kolektif yang dilakukan oleh BUM Desa mengandung unsur bisnis sosial dan bisnis ekonomi.

Tradisi berdesa pada BUMDesa di Desa Kedungprimpen diwujudkan dengan modal sosial didalam pengelolaan unit usaha BUMDesa, yakni pompanisasi. Unsur-unsur kerjasama, solidaritas, dan kepercayaan menjadi hal mutlak yang diperlukan untuk memastikan sistem pompanisasi bekerja dan menjangkau seluruh sawah dari penduduk Desa Kedungprimpen. Kerjasama, menjadi poin pertama, dimana jumlah pengurus BUMDesa yang terbatas untuk melakukan perawatan saluran-saluran air pompanisasi membutuhkan bantuan dari seluruh *stakeholder* untuk melakukan hal tersebut. Kemudian, kerjasama juga dibutuhkan didalam pembagian hasil usaha antara petani dan BUMDesa, kerjasama dan rasa percaya penting untuk dimiliki oleh kedua pihak sehingga pembagian hasil dapat dilakukan. Selanjutnya, pengembangan BUMDesa di Desa Kedungprimpen dapat dilakukan dengan memberikan penekanan pada perencanaan secara inklusif dimana musyawarah desa sebagai forum tertinggi harus dihormati, hal ini sekaligus mendorong partisipasi aktif dari masyarakat desa kedalam pembangunan ekonomi yang selaras dengan pembangunan sosial.

Perkembangan sosial adalah hasil dari organisasi sosial dan sebagai suatu jenis dinamika di dalam organisasi sosial. Lembaga pembangunan merupakan kunci dari perkembangan sosial. Pada tingkat desa, organisasi atau lembaga desa adalah perantara antara lembaga pembangunan tingkat atas dengan masyarakat desa. Disinilah terjadi proses perubahan dari aktivitas kolektif, solidaritas, dan partisipasi kearah aktivitas produktif.

Partisipasi ini akan berarti dalam proses pembangunan jika didukung oleh solidaritas dan kepercayaan dalam pengembangan usaha yang menjangkau jejaring sosial dengan komitmen kuat dari seluruh *stakeholder*, antara

lain pemerintah desa, BPD, direksi BUMDesa, pengurus unit Pompanisasi Srisedani, pekerja lapangan, dan masyarakat Desa Kedungprimpen secara keseluruhan.

Didalam perekonomian penduduk Desa Kedungprimpen, BUMDesa memiliki peran penting didalam pengelolaan irigasi, yang artinya BUMDesa bertanggungjawab penuh untuk melakukan pendistribusian air kesetiap lahan pertanian penduduk Desa Kedungprimpen. Pada tahap ini, BUMDesa tidak saja penting untuk menekankan pada partisipasi penduduk secara aktif, tetapi juga harus memberikan prioritas pada kebijakan yang mendukung penuh usaha ekonomi penduduk, yang dalam hal ini adalah pertanian. Atas unit usaha ini, BUMDesa melalui Pompanisasi Srisedani mendapatkan sepetujuh bagian dari total luasan panen di Desa Kedungprimpen pada setiap musim tanam. Disini pengelolaan BUMDesa patut untuk mendapatkan perhatian.

Pada sistem pembagian hasil usaha Pompanisasi Srisedani penting untuk dilakukan penataan ulang. Hal ini merupakan bentuk strategi menjaga komitmen BUMDesa sebagai unit usaha ekonomi desa yang bersifat kolektif antara pemerintah desa dan masyarakat desa, dimana usaha ekonomi dilakukan mengandung unsur bisnis sosial dan bisnis ekonomi.

Penataan ulang pembagian hasil usaha diantaranya adalah pada alokasi untuk kesejahteraan desa. Berdasarkan hasil penelitian, alokasi kesejahteraan desa baru diperuntukan untuk aparat pemerintahan desa, sehingga belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat terbawah. Saat ini, alokasi untuk lapisan masyarakat terbawah baru dari zakat sebesar 2,5 persen dari hasil usaha, dan belum dialokasikan secara khusus sebagai bagian dari bagi hasil usaha. Sehingga perencanaan kebijakan BUMDesa yang dapat menjangkau

seluruh elemen masyarakat terkhusus lapisan terbawah adalah dengan penataan ulang sistem pembagian hasil usaha disertai dengan perubahan pada proporsi alokasi untuk kesejahteraan desa. Hal ini penting untuk diperhatikan sebagai bentuk strategi untuk menyelaraskan pembangunan ekonomi dan pembangunan sosial.

Kemudian, terkait alokasi pembagian hasil usaha untuk kepemudaan yang dalam hal ini karang taruna, penting diingat bahwa dalam aspek pembangunan kepemudaan selain dibutuhkan sumber dana, juga diperlukan pembinaan minat bakat pada penduduk usia muda. Sehingga, partisipasi aktif dari penduduk usia muda penting untuk diberikan ruang didalam perumusan arah kebijakan BUMDesa.

Selanjutnya, terkait dengan kebutuhan penduduk Desa Kedungprimen atas lahan pertanian, BUMDesa memiliki potensi yang dapat dikelola. Potensi ini adalah berupa tanah kas desa yang dilelang untuk memperoleh Pendapatan Asli Desa (PADes). Luas keseluruhan tanah kas desa yang dilelang adalah 16,635 Ha, dengan jumlah pendapatan asli desa (PADes) yang dapat dihimpun dari pelelangan tanah kas desa pada tahun 2017 adalah senilai Rp. 500.540.000.

Pengelolaan ini dapat dilakukan oleh BUMDesa dengan komitmen untuk melakukan distribusi sumber nafkah pada lapisan terbawah penduduk di Desa Kedungprimen dengan biaya sewa terjangkau. Hal ini sekaligus merupakan strategi dalam peningkatan kualitas ekonomi penduduk Desa Kedungprimen.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa, BUMDesa sebagai unit usaha ekonomi desa bersifat kolektif antara pemerintah desa dan masyarakat desa, dimana

usaha ekonomi yang dilakukan mengandung unsur bisnis ekonomi dan bisnis sosial.

Didalam perekonomian penduduk Desa Kedungprimen, BUMDesa memiliki peran penting didalam pengelolaan irigasi, dan bertanggungjawab penuh untuk melakukan pendistribusian air ke setiap lahan pertanian penduduk Desa Kedungprimen di dalam proses produksi pertanian. Pada aspek sosial, BUMDesa memiliki tanggungjawab didalam pembagian hasil usaha pengelolaan irigasi kepada seluruh lapisan penduduk di Desa Kedungprimen, secara khusus lapisan terbawah.

BUMDesa di Desa Kedungprimen memiliki potensi mengembangkan unit usaha yang dapat dikelola berupa tanah kas desa. Pengelolaan tanah kas desa oleh BUMDesa dapat digunakan sebagai strategi peningkatan kualitas ekonomi penduduk sekaligus mengurangi ketimpangan. Hal ini dapat dilakukan dengan adanya komitmen kuat antara seluruh *stakeholder* untuk mendistribusikan tanah kas desa kepada golongan lapisan terbawah penduduk dengan biaya sewa terjangkau. Upaya tersebut perlu terus dikembangkan dengan meningkatkan status kelembagaan, sumberdaya manusia, sarana prasarana, dan otoritas dari BUMDesa.

SARAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi yang selaras dengan pembangunan sosial diperlukan intervensi kebijakan pada tingkat desa yang mengakomodir semua pihak, yang dapat dicapai dengan:

1. Kemauan dan komitmen kuat dari seluruh stakeholder didalam pengelolaan BUMDesa untuk melakukan penataan ulang alokasi pembagian hasil usaha. Termasuk pada

- penguatan status kelembagaan BUMDesa.
2. Peningkatan kapasitas SDM didalam manajerial unit usaha BUMDesa. Hal ini dapat diajukan kepada instansi terkait yang lebih tinggi dalam bentuk pelatihan atau pendampingan.
 3. Pengawasan kinerja BUMDesa oleh seluruh masyarakat desa sebagai bentuk partisipasi aktif dalam pembangunan.
 4. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana pendukung unit usaha BUMDesa.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih kepada seluruh masyarakat Desa Kedungprimpen yang sangat terbuka dalam memberikan informasi dan inspirasi kepada peneliti.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, I. R. (2013). *Intervensi Komunitas & Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat* (1 ed.). Jakarta: Rajawali Press.
- Adi, I. R. (2015). *Kesejahteraan Sosial: Pekerjaan Sosial, Pembangunan Sosial, dan Kajian Pembangunan*. Jakarta: Rajawali Press.
- Badan Pusat Statistik. (2017). *Jumlah Penduduk Miskin Menurut Provinsi 2007-2017*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Budiono, P. (2015). Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Bojonegoro (Studi di Desa Ngringinrejo Kecamatan Kalitidu dan Desa Kedungprimpen Kecamatan Kanor). *Jurnal Politik Muda*, Vol. 4, No. 01, 116-125.
- Chambers, R. (1987). *Pembangunan Desa: Mulai dari Belakang*. Jakarta: LP3ES.
- Creswell, J. W. (2014). *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran* (4th ed.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ife, J. (2013). *Community Development in An Uncertain World Vision, Analysis and Practice*. New York: Cambridge University Press.
- Kementerian Dalam Negeri. (2010). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa*. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. (2015). *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran BUM Desa*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- Midgley, J. (2005). *Pembangunan Sosial Perspektif Pembangunan dalam Kesejahteraan Sosial*. (D. Setiawan, & S. Abbas, Trans.) Jakarta: Ditperta Depag RI.
- Muhtar, & Purwanto, A. B. (2016). Peran Unit Pelayanan Terpadu Kesejahteraan Anak Nagari dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus di Kota Payakumbuh). *Sosio Konsepsia*, Vol. 5, No. 03, 205-2016.
- Nainggolan, T., & Susantyo, B. (2017). *Upaya Percepatan Penanggulangan*

- Kemiskinan Melalui Pogram Keluarga Harapan: Studi di Empat Daerah di Indonesia. *Sosio Konsepsia*, Vol. 7, No. 01, 31-46.
- Prasetyo, R. A. (2016). Peranan BUMDES dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro. *Dialektika*, Vol. XI, No.01, 86-100.
- Putra, A. S. (2015). *Badan Usaha Milik Desa: Spirit Usaha Kolektif Desa*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta: Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. (2005). Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Jakarta: Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Jakarta: Republik Indonesia.
- Ridlwan, Z. (2013). Payung Hukum Pembentukan BUMDes. *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 03, 355-370.
- Setiawan, H. H. (2017). Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pusat Kesejahteraan Sosial. *Sosio Informa*, Vol. 3, No. 03, 273-286.
- Sofianto, A. (2017). Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pedesaan Melalui Kelompok Usaha. *Sosio Informa*, Vol. 3, No. 03, 2013-215.
- Sumarti, T. (2007). Kemiskinan Petani dan Strategi Nafkah Ganda. *Jurnal Sodality*, Vol. 1, No. 02, 217-232.